

STRATEGI PENGEMBANGAN APLIKASI PADA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Machbuba Beben ¹, Dafyar Eliadi H ², Edi Mulyadi ³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan aplikasi dalam mendukung penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana penerapan aplikasi dapat menjawab tantangan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) serta diperkuat dengan pandangan Albert S. Humbyres mengenai *strategic alignment*, yang menekankan pentingnya keselarasan antara faktor internal organisasi dengan dinamika eksternal agar strategi pengembangan dapat berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pengelolaan keuangan daerah telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat transparansi dan mempercepat proses administrasi, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi, serta resistensi dalam adaptasi sistem baru. Adapun peluang dapat dimaksimalkan melalui kolaborasi antar perangkat daerah dan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, sementara ancaman eksternal dapat diminimalkan dengan penguatan kebijakan keamanan data dan manajemen risiko. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pengembangan aplikasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD. Rekomendasi yang diberikan antara lain perlunya strategi peningkatan kompetensi aparatur, pemutakhiran teknologi secara berkelanjutan, serta penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan Aplikasi, Akuntabilitas, Teori SWOT, BPKD.

Abstract

This study aims to analyze application development strategies to support regional financial administration and accountability in order to improve accountability in the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Tangerang City Regional Financial Management Agency (BPKD). The research problem focuses on how application implementation can address the challenges of transparency, effectiveness, and efficiency in regional financial management. The research method used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and document reviews. Data analysis was conducted

using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) theoretical framework and reinforced by Albert S. Humbyres's perspective on strategic alignment, which emphasizes the importance of alignment between internal organizational factors and external dynamics for effective development strategies. The results indicate that regional financial management applications have made a positive contribution to strengthening transparency and accelerating administrative processes, although obstacles remain such as limited human resources, the need for technological infrastructure improvements, and resistance to adapting to new systems. Opportunities can be maximized through collaboration between regional agencies and the utilization of information technology developments, while external threats can be minimized by strengthening data security policies and risk management. The research conclusions confirm that the development of regional financial administration and accountability applications plays a crucial role in improving the accountability of regional budget management. Recommendations include the need for a strategy to improve staff competency, continuous technology upgrades, and strengthening cross-sectoral regulations and coordination.

Keywords: *Application Development Strategy, Accountability, SWOT Theory, BPKD.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah mendorong transformasi signifikan pada tata kelola pemerintahan, terutama dalam upaya meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas publik. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah menegaskan pentingnya pengembangan *E-government* sebagai strategi modernisasi birokrasi. Implementasi teknologi informasi menjadi pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan efisiensi layanan, percepatan proses administrasi, serta penguatan sistem pengawasan keuangan daerah.

Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 (Pemerintahan et al. 2014) hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik termasuk juga pemerintah Kota Tangerang. Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial.

Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau *Government* yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam Tindakan

untuk menyegarkan kembali sistem birokrasi terdapat dalam rangka penyusunan struktur lembaga, dimana prinsip tata kelola yang baik telah dijadikan sebagai landasan utama, terutama dalam memperkuat kerja sama yang produktif antara tiga entitas utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kemampuan, keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial (Rahadian, 2019) termasuk juga dalam menjalankan pelaksanaan digitalisasi *government* dan *E-Government* dalam upaya mempermudah instansi maupun SKPD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai Tugas pokok dan fungsinya termasuk juga pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Tangerang yang menjalankan tupoksi Penatausahaan dan Akuntansi pemerintahan daerah Kota Tangerang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang sebagai entitas strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah telah mengembangkan aplikasi SP3KTRA untuk mendukung proses penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Aplikasi ini digunakan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun setelah peneliti mengamati masih ada permasalahan yang sering terjadi dan menjadikan proses pencairan SP2D menjadi terhambat adalah adanya kesalahan penginputan nomor rekening penyedia oleh SKPD. Dalam proses penelitian berkas, kesalahan tersebut sering ditemukan, mengakibatkan berkas akan di kembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki kembali. Secara alur proses hal tersebut dapat mengakibatkan waktu proses menjadi lebih lama padahal untuk menghindari permasalahan kesalahan penginputan perlu ada upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan fitur yang dapat memverifikasi apakah nomor rekening penyedia yang akan digunakan adalah benar. Perlu adanya integrasi antara aplikasi spektra dengan aplikasi perbankan, dalam hal ini BJB.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan analisis strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan aplikasi SP3KTRA sebagai instrumen penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran. Analisis SWOT menjadi pendekatan yang relevan untuk menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas aplikasi tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi aplikasi SP3KTRA di BPKD Kota Tangerang serta merumuskan strategi pengembangan yang dapat meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan (*Strengths*) strategi pengembangan aplikasi pada penatausahaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
2. Bagaimana Kelemahan (*Weaknesses*) strategi pengembangan analisis implementasi aplikasi pada penatausahaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
3. Bagaimana Peluang (*Opportunity*) strategi pengembangan aplikasi pada penatausahaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan anggaran

pendapatan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?

4. Bagaimana ancaman (*Threats*) strategi pengembangan aplikasi pada penatausahaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebab penelitian merupakan peristiwa faktual yang terjadi dan akan lebih jelas dengan penggambaran. Menurut Moleong (2007), Pengembangan metode deskriptif melalui pengumpulan data baik itu kata kata maupun gambar, namun bukan angka- angka. Selanjutnya, semua yang dikumpulkan dapat menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk menggambarkan penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2007). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi dan strategi pengembangan aplikasi SP3KTRA dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas APBD di BPKD Kota Tangerang. Data yang digunakan didalam penelitian ini ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer Data Primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara (Sugiyono, 2018:78). Sumber yang dimaksud dapat berupa benda- benda, situs, atau manusia. Data Primer data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian sumber data diperoleh melalui wawancara dan tatap muka antara peneliti dan informan, serta melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas informan. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder merupakan data dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen baik tertulis maupun foto. Dalam hal ini yang peneliti gunakan dari beberapa buku, jurnal penelitian.

Teknik pengambilan data didalam penelitian in menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan informan secara sengaja ditentukan oleh peneliti yakni informan yang dianggap memiliki kompetensi dan dapat memberikan informasi yang kredibel terkait dengan masalah penelitian. Informan yang ditentukan didalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 informan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan reduksi data, displa atau penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, khususnya pada Bidang Penatausahaan dan Akuntansi. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena instansi ini merupakan pelaksana utama aplikasi SP3KTRA. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kami menemukan bahwa BPKAD Kota Tangerang telah mengimplementasikan beberapa strategi kunci dalam mengembangkan aplikasi untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD. Dimana pada Penelitian ini menggunakan kerangka analisis SWOT yang dikembangkan oleh Albert S. Humphrey untuk melihat strategi pengembangan aplikasi SP3KTRA pada penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD di BPKD Kota Tangerang. Analisis dilakukan dengan menggali persepsi dan pengalaman para informan kunci, utama, dan pendukung melalui metode wawancara. Strategi pengembangan SP3KTRA dapat dijelaskan melalui empat indikator utama menurut kerangka *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT) sebagai berikut:

a. Indikator Kekuatan (*Strength*)

Pada dimensi kekuatan (*strength*), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Spektra memiliki beberapa fitur unggulan yang tidak dimiliki sistem manual. Kasubid Akuntansi menegaskan bahwa “SP3KTRA punya jejak digital yang jelas. Setiap transaksi tercatat lengkap dengan siapa yang input dan siapa yang verifikasi.” Dari sini terlihat bahwa kekuatan utama SP3KTRA terletak pada akuntabilitas dan keamanan sistem melalui audit trail. Kepala BPKD pun menambahkan bahwa laporan yang dihasilkan SP3KTRA sesuai standar akrual, sehingga lebih kredibel. Sebagai peneliti, saya melihat kekuatan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pilar *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.

b. Indikator Kelemahan (*Weaknesses*)

Berdasarkan informasi yang di dapatkan sesuai dengan hasil wawancara ini peneliti melihat bahwa Dari sisi kelemahan (*weakness*), mayoritas informan sepakat bahwa SP3KTRA masih memiliki keterbatasan dalam integrasi sistem, terutama dengan Bank BJB. Kepala BPKD menegaskan bahwa “SP3KTRA belum terhubung dengan Bank BJB, sehingga beberapa proses transaksi tetap manual dan mengurangi efisiensi.” Hal ini didukung oleh penjelasan Kasubid Penatausahaan yang menyoroti persoalan teknis jaringan internet, serta PPK SKPD yang menekankan masih adanya pekerjaan ganda karena dokumen fisik tetap harus disiapkan. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menghapus cara kerja lama, sehingga proses transisi masih berjalan setengah hati.

c. Indikator Peluang (*Opportunity*)

Pada dimensi peluang (*Opportunity*), peneliti melihat SP3KTRA sebagai instrumen yang sejalan dengan visi *smart city* Kota Tangerang. Sekban BPKD menyatakan bahwa “SP3KTRA ini sejalan dengan visi *smart city*. Keuangan daerah dapat dipantau secara real-time, sehingga transparansi publik meningkat.” Kutipan ini menunjukkan bahwa SP3KTRA bukan hanya sekadar aplikasi keuangan, tetapi juga instrumen strategis dalam transformasi pemerintahan digital. Peluang lain yang ditunjukkan Kasubid Akuntansi adalah integrasi dengan SIPD nasional, yang akan memperkuat kualitas laporan keuangan daerah. Dari sisi peneliti, saya menilai peluang ini sangat

relevan, karena pemerintah pusat memang sedang mendorong sinkronisasi data dan sistem keuangan daerah. pemerintahan digital. Peluang lain yang ditunjukkan Kasubid Akuntansi adalah integrasi dengan SIPD nasional, yang akan memperkuat kualitas laporan keuangan daerah.

d. Indikator Ancaman (*Threats*)

Indikator ancaman adalah indikator yang memberikan gambaran mendalam dalam upaya penyusunan strategis, yang dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis apa saja faktor yang menghambat penggunaan Aplikasi SP3KTRA, Ancaman (*Threats*) juga cukup menonjol. Beberapa informan menyoroti risiko keamanan data. Ketua Tim Pertanggungjawaban APBD menekankan, “Karena menyangkut data keuangan daerah, pengamanan harus jadi prioritas. Jangan sampai ada kebocoran yang menurunkan kepercayaan publik.” Ancaman lain adalah perkembangan regulasi pusat yang bisa saja mengharuskan penggunaan aplikasi nasional, sehingga SP3KTRA berisiko kehilangan relevansi. Di sisi lain, resistensi pegawai terhadap sistem digital juga disebutkan sebagai hambatan yang berpotensi melemahkan efektivitas SP3KTRA. Menurut analisis saya, ancaman terbesar sebenarnya ada pada dua aspek yaitu keamanan siber dan regulasi pusat, karena keduanya berada di luar kendali BPKD sebagai institusi pengguna.

2. Pembahasan

a. Menganalisis Indikator Kekuatan (*Strength*) Strategi Pengembangan Aplikasi Penatausahaan dan pertanggung Jawaban Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja BPKD Kota Tangerang.

Aplikasi SP3KTRA memiliki kekuatan yang signifikan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam teori SWOT menurut Albert S. Humphrey, *strength* merupakan faktor internal yang memberikan keunggulan bagi organisasi untuk mencapai tujuan. SP3KTRA menyediakan sistem pencatatan digital yang mampu merekam setiap transaksi keuangan daerah secara otomatis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa sistem akuntansi berbasis teknologi informasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas publik. Selain transparansi, kekuatan lain dari SP3KTRA adalah efisiensi birokrasi. Proses penatausahaan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama karena harus melalui berbagai tahapan manual kini dapat dilakukan secara lebih cepat dengan sistem digital. Efisiensi ini mendukung prinsip *good governance* yang menekankan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari & Nugroho (2021) dalam *Jurnal Administrasi Publik*, yang menemukan bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks lokal, Putri (2022) di *Jurnal Administrasi Publik UNIS Tangerang* menegaskan bahwa penerapan aplikasi dalam tata kelola keuangan di Kota Tangerang meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkecil potensi kesalahan manual. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama BPKD adalah keberadaan sistem aplikasi yang

sudah terarah pada transparansi, serta kesiapan SDM dalam mendukung pengembangan lebih lanjut.

- b. Menganalisis Indikator Kelemahan (*Weaknesses*) Strategi Pengembangan Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja BPKD Kota Tangerang.

Salah satu kelemahan yang sering muncul adalah keterbatasan integrasi dengan sistem eksternal, khususnya dengan perbankan daerah. Hal ini menyebabkan sebagian proses transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga mengurangi efektivitas digitalisasi. Dalam kerangka SWOT, hal ini termasuk *weakness*, yaitu kelemahan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Menurut Indrajit (2017), kelemahan utama dalam implementasi sistem informasi publik adalah rendahnya literasi digital aparatur serta kesenjangan teknologi antar unit pemerintahan. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama (2020) dalam Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa resistensi pegawai terhadap aplikasi baru sering memperlambat proses adopsi teknologi.

Dari kajian lokal, Hidayat (2021) di *Jurnal UNIS Tangerang* menemukan bahwa sebagian pegawai pemerintah daerah di Tangerang masih kesulitan beradaptasi dengan aplikasi pelaporan digital, yang berdampak pada keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kelemahan utama yang perlu diperhatikan BPKD adalah keterbatasan infrastruktur dan kompetensi pegawai dalam pemanfaatan aplikasi.

Menurut pendapat peneliti, kelemahan dalam mengintegrasikan sistem keuangan dengan lembaga perbankan dapat menyebabkan terjadinya duplikasi pekerjaan dan memperlambat pelayanan publik. Kelemahan lain terletak pada aspek sumber daya manusia. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai, sehingga sering terjadi kesalahan input data atau keterlambatan dalam pengoperasian aplikasi.

- c. Menganalisis Indikator Peluang (*Opportunity*) Strategi Pengembangan Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja BPKD Kota Tangerang.

Dalam perspektif SWOT, *opportunity* adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas manfaat dari suatu sistem. Penelitian Wicaksono (2022) juga menegaskan bahwa integrasi dengan SIPD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Selain itu, peluang lain adalah peningkatan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan APBD. Dengan adanya akses data keuangan yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Osborne dan Brown (2011) yang menekankan bahwa inovasi publik dalam bentuk digitalisasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Oleh karena itu, SP3KTRA memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Lebih lanjut, Fauziah (2023) dalam *Jurnal Ilmu Administrasi UNIS Tangerang* menegaskan bahwa digitalisasi keuangan di Tangerang merupakan peluang strategis untuk menciptakan

pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan demikian, peluang pengembangan aplikasi sangat besar untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Pendapat peneliti pada indikator *Opportunity* adalah peluang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Dengan integrasi ini, laporan keuangan daerah akan lebih seragam, transparan, dan sesuai dengan standar nasional

- d. Menganalisis Indikator Ancaman (*Threats*) Strategi Pengembangan Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja BPKD Kota Tangerang.

Salah satu ancaman utama adalah masalah keamanan data. Ancaman utama berasal dari keamanan data, karena informasi keuangan merupakan target sensitif. Penguatan sistem keamanan menjadi prioritas. Perubahan kebijakan pusat juga harus diantisipasi dengan menyiapkan fleksibilitas integrasi. Resistensi pegawai dan kecepatan perkembangan teknologi menjadi ancaman yang harus dihadapi melalui pelatihan berkelanjutan dan upgrade aplikasi secara rutin. Karena aplikasi ini menyimpan informasi keuangan daerah yang sangat penting, risiko kebocoran data atau serangan siber menjadi hal yang harus diantisipasi. Humphrey menekankan bahwa *threats* adalah faktor eksternal yang berpotensi merugikan organisasi bila tidak ditangani dengan baik. Santoso (2021) juga menegaskan bahwa sistem informasi keuangan daerah sangat rentan terhadap ancaman keamanan, sehingga perlu penguatan infrastruktur teknologi dan kebijakan keamanan data yang memadai. Menurut Osborne dan Brown (2011) menekankan bahwa inovasi publik harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika teknologi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Spektra terus diadaptasi dan ditingkatkan sesuai perkembangan zaman. Pendapat peneliti pada indikator ancaman adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Apabila Spektra tidak dikembangkan secara berkelanjutan, maka ada kemungkinan aplikasi ini tertinggal dibandingkan sistem lain yang lebih modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "*Strategi Pengembangan Aplikasi Pada Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*" dapat ditarik beberapa kesimpulan. Analisis menggunakan indikator Albert S. Humbryes yaitu:

Aplikasi penatausahaan (SP3KTRA) telah didukung dengan dasar hukum yang jelas, memiliki legitimasi dari pemerintah pusat maupun daerah, serta memperoleh dukungan penuh dari pimpinan daerah. Selain itu, BPKD Kota Tangerang memiliki aparatur yang cukup kompeten di bidang pengelolaan keuangan, sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Faktor lain yang menjadi kekuatan adalah adanya komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Masih terdapat keterbatasan integrasi antar-sistem, di mana aplikasi SP3KTRA belum sepenuhnya terhubung dengan sistem lain seperti perbankan dan sistem pusat (SIPD). Hal ini menyebabkan masih adanya ketergantungan pada input manual yang meningkatkan risiko kesalahan, terutama dalam hal penginputan data rekening pihak ketiga. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan belum merata sehingga tidak semua aparatur memahami secara optimal pemanfaatan aplikasi. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan membuka peluang besar untuk memperkuat implementasi aplikasi. Dukungan dari kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta perkembangan teknologi seperti *cloud computing*, *big data*, dan *artificial intelligence* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Selain itu, adanya tuntutan masyarakat terhadap transparansi publik juga menjadi peluang untuk meningkatkan legitimasi aplikasi ini.

Ancaman yang muncul antara lain adalah risiko keamanan siber yang dapat mengganggu integritas data keuangan, keterbatasan anggaran daerah dalam melakukan pembaruan sistem, serta adanya resistensi sebagian pegawai terhadap perubahan sistem dari manual ke digital. Selain itu, ketidakselarasan regulasi antar pemerintah pusat dan daerah juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi aplikasi secara optimal.

Referensi

Buku

- Brewster, C. (2007). *Government and Governance Theory*. Dalam Labolo, M. (Ed.). Jakarta: RajaGrafindo.
- Humphrey, A. S. (2005). *SWOT Analysis: Origins and Development*. Stanford Research Institute.
- Indrajit, R. E. (2017). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Good Governance Nasional*. Jakarta: KNKG.
- Labolo, M. (2007). *Teori Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Osborne, S. & Brown, K. (2011). *Public Management and Governance in the Digital Era*. London: Routledge.
- Rahadian, A. (2019). *Reformasi Pemerintahan dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. (2011). *Reformasi Administrasi Publik dan Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Fauziah, N. (2023). Digitalisasi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Clean Government. *Jurnal Ilmu Administrasi UNIS Tangerang*.

- Hidayat, R. (2021). Tantangan Implementasi Aplikasi Pelaporan Keuangan Daerah di Kota Tangerang. *Jurnal Administrasi UNIS Tangerang*.
- Pratama, D. (2020). Resistensi Pegawai terhadap Implementasi Aplikasi Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(2), 112–124.
- Santoso, H. (2021). Keamanan Data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 4(1), 33–45.
- Sari, D. & Nugroho, A. (2021). Digitalisasi Sistem Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Transparansi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 240–250.
- Wicaksono, A. (2022). Integrasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 55–68.

Perundang - Undangan

- Pemerintahan Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan